PROFESIONALISME POLRI DI ERA REFORMASI
DALAM ISU-ISU KEAMANAN DOMESTIK
MELAWAN TERORISME

(Simposium 10 Tahun Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia)
Penyelenggara LESPERSSI, IDSPS, HRWG dan DCAF Swiss, Jakarta 28 Mei 2008 *)

Oleh Antón Tabah **)

Flash back:

Aada wewaler (ajaran luhur) dari nenek moyang kita ribuan tahun silam berbunyi; "Deso mowo coro, Negoro mowo toto" (desa ada coro=adat (hukum tak tertulis) Negara ada toto=UU (hukum tertulis)). Keduanya harus ditaati warga agar; **toto, titi, tentrem karto, raharjo (TTTKR)** yang dijadikan filosofis kerja POLRI sejak kelahirannya (tahun 1945)

Toto=hukum yang baik. **Titi**=hukum yang pasti, tidak diskriminasi, wujudkan masyarakat **tentrem** (aman). Mencipta **karto;** aktifitas berjalan baik (ekonomi, sosial, politik dsb). Karto tingkatkan **raharjo**; kesejahteraan. Literatur Kawi (Jawa Kuno) negara: gemahripah pasir wukir lohjinawi (tiada sejengkalpun tanah terlantar, hutan, gunung pantai, sungai, laut dirawat. TTTKR mencipta bangsa; panjang dowo pocapane, punjung duwur kawibawane (bercitra baik/berwibawa didunia). Betapa cerdas nenek moyang kita padahal wewaler ini sudah ribuan tahun. Kini abad XXI lahir "teori"; Negara dihormati dunia karena 4 hal; elite kompak (state, politisi, market), kepastian hukum, diplomasi baik, ekonomi maju. Jika 4 hal tersebut buruk, negara/bangsa terpuruk dimata dunia.

Rezim BK dibagi dua. (1) Pasca proklamasi Polri combatan, sempat dibawah Depdagri selama 9 bulan. Tapi dalam debat panjang pendiri negara (Founding Fathers) menetapkan; Polri dibawah Presiden. (Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, 2008). (2) Pasca Dekrit 59, Polri Alat Revolusi, Otoriter, Polri=ABRI UU/13/61. Kemudian Rezim HMS 1966-1998; Polri Alat Politik. Dwifungsi ABRI. Otoriter. UU 20/81, UU/28/82/ UU/ ?/87. Rezim Reformasi 1998, Polri Alat Negara. UUD 1945 Psl 30, UU 2/2002/ UU 8/81 KUHAP.

Tapi bagaimana diera reformasi? Reformasi 10 tahun dengan 4 presiden. Era Habibi masa transisi; Gusdur; 2tahun. Mega cuma sisanya. Era SBY mulai menata. Berhasil dalam diplomasi; berbagai konflik internal, Aceh, Maluku Poso, Papua. Pengaruhnya bagus didunia internasional. Lihat sebelum SBY. Timor Timur, Sipadan Ligitan lepas, Ambalat. Kini muncul Pedra Branca (ICJ) ujung Batam. akan pengaruhi garis batas Indonesia.?

Secara umum, Rakyat cuma butuh Murah sandang pangan. Dari ajaran "pasirwukir lohjinawi" jutaan hektar tanah diterlantarkan, hutan dibabat. PBB; Indonesia Perusak hutan tercepat didunia. Ladang rakyat disamping rumah tak diberdayakan. (Tugas negara) (Jepang tak punya lahan, tanam sayur/buah dipot-pot, jadi exportir). Kita? Gunung, sungai, pantai terpanjang didunia dibiarkan terkulai (wisata jeblok) Elite tak kompak, hukum tak pasti, ekonomi buruk. Produk2 kita diakui produk negara lain. "Tempe" dipaten Jepang

Permasalahan: Makalah ini dibagi menjadi 8 bagian kajian meliputi;

1. Flash back
2. Takdir Sejarah?
3. Reformasi Polri dan TNI
4. Check and Balances
5. Profesionalisme Polri
6. Polri Ungkap Terorisme
7. Community Policing
8. Pemberantasan KKN, Kenapa Gagal?

Apa Ini Takdir Sejarah?

Apakah ini ”takdir” sejarah? Atau kutukan Empu Gandring terjadi disetiap rezim? Lihat sejarah Ken Arok, Gajah Mada. Amangkurat. Semua jaya diawalnya, berakhir gagal Seperti sabda agung; **Kullu naba-in mustaqor**. Sejarah selalu berulang? Lihat rezim BK indah, manis diawal proklamasi semua satu tujuan; Merdeka. Tulus; sepi ing pamrih rame ing gawe (tiada interest pribadi kecuali hanya untuk kejayaan bangsa). Kondisi tersebut hanya bertahan sampai tahun 50an. Rezim BK (Orla) akhir 1959 ketika Polri di era kejayaannya, justru disatukan dengan TNI menjadi ABRI. Ini titik awal Polri menjadi lemah tak berdaya.

Penyatuan Polri dan TNI sudah sejak rezim BK. Bab XII UUD 1945 memisahkan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Ide BK ditentang Menteri Kepolisian Negara/ Kapolri Jenderal Pol R.Soekanto karena selain melanggar UUD 1945 juga akan merusak profesionalisme Polri. BK tetap pada sikapnya. Tanggal 29 Desember 1959 Jenderal R Soekanto mengundurkan diri. Sejarah ini peneguhan; Polri sudah demokratis sejak awal kemerdekaan. Polri alat negara bidang keamanan yang ruhnya penegak hukum dan Panglima Polri adalah hukum bukan kekuasaan dan Kapolri pertama memberi tauladan melewati panggung sejarah dengan sangat indah.

Prediksi Jenderal Soekanto, benar. Seperti wewaler; ”milik nggendong lali” (ke kuasaan sering membuat lupa diri). BK makin otoriter dengan ”Demokrasi Terpimpin”. BK dikukuhkan menjadi Presiden Seumur Hidup. UUD 1945; presiden selama 5 tahun jika terpilih lagi harus dengan pemilu. KKN merajalela, ekonomi ambruk rakyat sengsara. Terjadi titik balik. Rezim BK runtuh bersama Orla dipicu pemberontakan PKI yang gagal (1965) akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Komunis.

Awal 1966 angin segar rezim; Orde Baru (Orba) dibawah Pak Harto (HMS) Dalam waktu singkat HMS dapat mengatasi krisis ekonomi/politik antara lain dengan visi Trilogi pembangunan; stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas hankam. Indonesia berswa sembada pangan mengexpor beras keberbagai negara, dapat *award* PBB juga suksesnya program KB menekan pertumbuhan penduduk 6% pertahun. Lamanya berkuasa HMS terjebak pada lubang yang sama. Otoriter. Doktrin Dwifungsi ABRI, Polri dibawah Menhankam/Pangab. Kewenangan TNI (baca TNI/AD) rambah seluruh kehidupan berbangsa/bernegara. Polri lemah tak berdaya. Akhirnya HMS bernasib sama dengan BK, jatuh karena KKN, Indonesia terpuruk lagi, HMS jatuh bersama rezim Orba (1998)

Diganti rezim Reformasi (1998) kini berumur 10 tahun belum bangkit dari krisis Di bidang politik justru *set back* (multi partai yang diera BK Indonesia tak bisa membangun, diulang lagi diera reformasi), pendidikan, olahraga, persatuan dan kesatuan merosot. Dua yang menonjol era reformasi, kebebasan dan KKN yang akan dibasmi justru makin terbuka/merajalela. Awal reformasi (1999) KKN benar-benar dibasmi. Bahkan ahli pesawat terbang satu-satunya yang dimiliki Indonesia; Ilham Habibi (putra pak Habibi) dipaksa hengkang dari Nortanio karena dianggap Nepotisme? Kini jangankan nepotisme, korupsi, kolusi tak terkendali. Terbuka dan berjama’ah.

Kita bertanya; kenapa era awal Orba bisa cepat bangkit dari keterpurukan ekonomi dan politik? Setidaknya 5 hal; (1) Stabilitas trilogi terjaga (tidak banyak unjukrasa yang jadi salah satu sebab investor lari), (2) Kalangan elite kompak (state, politisi, market), (3) Presiden bisa melaksanakan pemerintahannya sampai pemilu berikutnya, (4) Tdak banyak parpol, (5) Ada GBHN memandu pola pembangunan 5 s/d 25 tahun. Dengan demikian pencapaian dan kegagalan pembangunan dapat dipertanggungjawab kan. Kita juga bertanya. Mungkinkah GBHN masih kita perlukan? Koreksi reformasi.

Era reformasi elite tak kompak. saling hujat, saling cerca, saling tuding, ”aji mumpung” (terlalu banyak parpol) bahkan elite juga ngajari **”melawan hukum”.** Ironis.

Memang. Karena itu, reformasi sudah 10 tahun, ekonomi tak juga bangkit. Masyarakat bingung.

Reformasi Polri dan TNI:

Memenuhi permintaan panitia kajian ini sesuai judul diatas. Reformasi Polri. Kenapa yang terus digocoh Polri? **Kenapa bukan reformasi DPR? MA? Parpol? Otda? Pertamina? Pertanian? Pertambangan? Kehutanan? Kehakiman? Dep dagri? DepKu? Pajak? Bea Cukai? PLN?** Padahal menurut para pakar, Polrilah institusi negara yang cepat mereform diri secara terukur. (Prof Selo Soemardjan, hlmn 4).

Sesuai ajaran filsafat untuk mengurai kebenaran diawali dari pertanyaan. kenapa reformasi? Seperti awal makalah, kepastian hukum dasar utama tata tertib bermasyarakat, berbangsa, bernegara. *Spirit* reformasi supremasi hukum demokrasi *civil society*. Inti demokrasi adalah taat hukum. Disini konstitusi UUD1945 dan UU menjadi dasar Bicara reformasi Polri, tak lepas dari konstitusi UUD1945 pasal 30, (Fungsi pertahanan domain TNI dan fungsi keamanan domain Polri), Tap MPR III V, VI, VII/2000, Tap MPR XI/1998 dan berbagai UU (UU 2/2002 Tentang Polri, UU 3/2002, Tentang Pertahanan, UU 34/2004 Tentang TNI, UU 8/1981 Tentang KUHAP, Perpu dan sebagainya.

Tap MPR Nomor V/2000 Tentang Pemantapan Kesatuan dan Persatuan

Bab II (6): Orba dengan sistem otoriter melahirkan pemimpin-pemimpin tak aspiratif (11); Dwifungsi ABRI > penyimpangan peran TNI dan Polri

Bab III (11); Kondisi yang diharap meningkatkan profesionalisme dan pulihnya citra TNI dan Polri.

Bab IV (11); Arah bijak Tap MPR; mengefektifkan TNI alat negara bidang pertahanan POLRI alat negara bidang keamanan, keduanya bagian dari rakyat

Tap MPR Nomor VI/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri, 4 Pasal:

Pasal 1: TNI/ Polri kelembagaan terpisah sesuai peran/fungsinya.

Pasal 2 (1); TNI alat negara bidang pertahanan negara

(2): Polri alat negara bidang pemeliharaan keamanan

(3); Dalam hal terdapat keterkaitan giat pertahanan dan giat keamanan TNI dan Polri bekerjasama saling membantu.

Hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 23/1959

Jika negara dalam keadaan Perang, Darurat Militer > Peran TNI dan Polri bantu Negara Darurat Sipil > Peran Polri dan TNI bantu. (Sudah dipraktekan di Aceh ketika Darurat Militer dan ketika beralih ke Darurat Sipil) Jika dalam Tertib Sipil sepenuhnya peran Polri TNI tak terlibat.

Pasal 3 ayat (1); Peran TNI dan Polri ditetapkan dengan Tap MPR ayat 2; Hal-hal yang menyangkut TNI dan Polri secara lengkap/rinci diatur UU secara terpisah.

Tap MPR Nomor VII/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri

Tap ini berisi penjabaran Tap Nomor V dan VI/2000 tentang peran TNI dan peran Polri. Hanya lebih rinci misal; prajurit TNI jika melanggar pidana umum tunduk pada peradilan umum di Pengadilan Negeri setempat (Lihat Bab I, pasal 4 a) Tentara dinegara mana pun tunduk pada peradilan umum, implementasi filosofi hukum semua warga negara sama dimata hukum (aquality before the law) Tentara diadili dengan hukum tentara di peradilan tentara hanya dalam 4 jenis pelanggaran hukum tentara; desersi, melawan atasan, menjadi mata-mata musuh dan membocorkan rahasia negara. Dan negara yang mengklaim diri sebagai negara Junta Militer seperti Myamar. Anggota Polri juga tunduk pada peradilan umum (Bab II, pasal 4). TNI dan Polri netral tak ikut politik praktis, tidak gunakan hak pilih/dipilih. Tap MPR V, VI dan VII/2000 telah rinci pada di UU No

2/2002, UU No 3/2002. UU 34/2004 (Tap-Tap MPR ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000)

Check and Balances:

Tap MPR Nomor III/2000 Tentang Sumber Hukum/Tata Urut Per-UU-an di Indo nesia. Pasal 2; Ada 7 tata urut (UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, Perda) Dirinci pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Pembuatan UU atau peraturan per-uuan tak boleh bertentangan dengan urutan diatasnya. Sekaligus koreksi dan check and balances institusi-institusi pelaksana agar taat prosedur pembuatan UU/aturan. Juga UU No; 10/2004 Tentang Mekanisme Pembuatan RUU, Perlukah RUU? RUU apa dibuat siapa. Misal perlukah RUU Kamnas? Siapa yang membuat RUU tersebut?.

Masalah check and balances di Polri tidak diragukan. Jauh sebelum reformasi Bapak Sosiologi Indonesia Prof Dr Selo Soemardjan menyatakan; "***Polri institusí yang paling transparan karenanya Polri banyak dicerca ketimbang dipuja. Pameo; jika saya salah tak seorangpun lupa, jika saya baik tak seorangpun ingat". Pomeo ini pas benar untuk Polri" (sambutan pada buku saya;*** **Catatan Harian Seorang Polisi)**. Apalagi di era reformasi. Secara internal banyak lembaga/badan yang mengontrol Polri, Secara eksternal apalagi, ada DPR, ada Kompolnas, ada pers ada masyarakat yang terus mengawasi kinerja Polri baik secara fisik maupun maya (cyber) situs internet. Secara internal mulai Kapolri Jenderal Sutanto ada ssstem kontrak bagi pejabat publik dilingkungan Polri, dari Kapolres, Kapolda dan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus). ada Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), ada Divpropam (Divisi Pengamanan Profesi) ada Provoost. Semua itu secara sistem terus bekerja. Sependapat dengan Bapak Sosiologi Indonesia tadi; tak ada intitusi yang setransparan Polri karena pekerjaannnya setiap saat bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Profesionalisme Polri Era Reformasi: (Perspektif Anti Terorisme)

Tap-Tap MPR diatas mengamanatkan tujuan utama pemisahan TNI dan Polri dari peran, fungsi, sruktural, instrumental dan kultural untuk meningkatkan ofesionalismenya

Orang mudah mengatakan profesionalisme tetapi tak tahu ma'rifat dan hakekat profesionalisme. Dari pengertian dasar saja sudah membentuk spektrum luas. Yang terbaik adalah berada pada titik equilibrium, keseimbangan ma'rifat dan hakekat. Menjelaskan makna profesional dan aplikasinya di Polri. Kamus besar bahasa Indonesia halaman 702, profesi diartikan sebagai pekerjaan dengan pendidikan dan keahlian tertentu perlu kepandaian khusus, ada sistem penggajian terukur. Dalam The Contemporary English Dictionary edisi III hlm 1499 Profess: mengumumkan secara terbuka bekerja profesional memiliki jenjang pendidikan, dipertanggungjawabkan dan mempunyai kode etik. Jika disimpulkan; profesional adalah pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekruitmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan. (Legge and Exley, 1975)

Polri jelas salah satu profesi maka harus dilaksanakan secara profesional. Dijabar kan dalam tiga langkah luhur; **preventif, pre-emtif dan represif.** Preventif; dengan berbagai program pemolisian (policing); Polisi sahabat anak, Polisi mitra masyarakat, polisi bina warga (*Policing Society*), *Community Policing*; komunitas nelayan, komunitas pesantren, komunitas kampus dan Bureaucracy Policing. P**reventif;** pada kondisi poten sial timbulnya gangguan (police hazard) **Pre-emtif** dari wacana menjadi nyata, secara fisik cegah tangkal kejahatan (siskamling, satpam) Dimedis ada jumantik. **Represif;** tindakan hukum (*law enforcement*) hanya tugas Polri karena upaya paksa diatur UU.

Reformasi mencipta independensi Polri, independensi memutus rantai intervensi dan tiadanya intervensi meningkatkan profesionalisme Polri. Tak di bayangkan kasus Bom Bali yang rumit terungkap jika itu terjadi saat Polri di bawah departemen pasti banyak intervensi yang membingungkan penyidikan

Polri Mengungkap Terorisme: (Jadi Standar Dunia)

Profesionalisme Polri teruji dalam membasmi kejahatan terorisme di Indonesia dengan sains dan teknologi (Scientific crime investigation) rumit. Ungkap Bom Bali yang goncang dunia Oktober 2002 dengan teknologi re-exting, Ungkap bom Marriot Agustus 2004 dengan DVI (Disaster Victims Identi vication). Ungkap bom Kedubes Australia 9 september 2004 dengan kombinasi keduanya. Demikian pula kasus bom lainnya. Tekno logi komunikasi super canggih untuk menditeksi keberadaan tersangka sehingga Polri berhasil menangkap pelaku-pelaku penting, bongkar jaringan dan pastikan ada jaringan Jl dan Al Qaeda yang sasarannya aset-aset milik AS dan sekutu-sekutunya. erikut data keberhasilan Polri memerangi terorisme di Indonesia.

Tahun: 99 : 2000: 001 : 002 : 003 : 004 ; 005 : 006 : 007 : 008 : KETERANGAN

CT : 7 : 75 : 81 : 28 : 7 : 8 : 3 : 2 : 1 : - : Ungkap Network : Tangkap Dr Azahari
CC : 3 : 42 : 59 : 19 : 30 : 5 : 3 : 2 : 0 : - : Jaringan N.M. Top :
Jumlah Crime Total (CT) Terorisme 10th Reformasi di Indonesia ; 206 kasus
Jumlah Crime Clearence (CC) 10th Reformasi; 158 kasus (77,83%)

Awal-awal reformasi kasus bom mulai naik, sasaran acak (gereja, mal, tempat public). Th 2002 sasaran mulai fokus; tempat-tempat orang asing dan aset-aset AS dan sekutunya yang ada di Indonesia (hotel, fast food dan kedubes). Kwantitas turun namun kualitas tinggi dan pengaruhnya ke dunia internasional sangat dahsyat.

Terrorist Network terkuak ketika Imam Samodera dkk ditangkap. Era Kapolri Jenderal Sutanto berhasil menangkap tokoh-tokoh kunci. Seperti Dr Azahari 12 Nopember 2005 di Batu Malang. Persembunyian Nurdin M Top di Temanggung. Kemudian kelompok Abu Dujana, Kelompok Sarwo Edi, kelompok Zarkasih Maret 2007 tertangkap diJogja dan Surabaya. Telah divonis PN Jakarta Selatan 21/4/2008 antara 8, 14 dan 15tahun penjara dan denda 10 juta rupiah serta dinyatakan Jl organisasi teroris dilarang di Indonesia.

Keberhasilan Polri harumkan nama Indonesia didunia dan mendapat banyak re ward PBB dan negara2 donor. Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation/ JCLEC semula akan dibangun di Thailand, PLATINA (Pusat Latihan Anti Teror International), TNCC (Trans National Crime Center) Pusat data teroris sedunia juga di Indonesia. Polri dijadikan model (standar) dunia dalam memerangi teroris karena baru Polri yang mampu ungkap secara yuridis kasus-kasus terorisme. Kepolisian AS yang berteknologi canggih saja belum bisa mengungkap kasus-kasus teroris kecuali dengan hukum gregetan (emosional) menuduh Osama Bin Laden tanpa bukti hukum. Juga kasus-kasus bom sebelumnya. 15 April 1995 Mal Oklahoma dibom 168 orang tewas, 400 orang luka berat. 19 Juli 1996, Long Island dibom 230 orang tewas dan kasus-kasus berskala kecil masih banyak lagi. Tak satupun kasus teroris terungkap di AS kecuali kasus bom Mal Oklahoma berhasil menangkap dua orang yaitu Timothi Archer dan Nocolas (Veteran Perang Teluk) tapi tak tuntas. Pengadilan Oklahoma memvonis bebas keduanya tak terbukti melakukan kejahatan.

Keberhasilan Polri benar-benar mencengangkan dunia apalagi dengan bukti-bukti ilmiah sangat akurat. Makin profesionalnya Polri tidak lepas dari independensi Polri

tidak dibawah lembaga apapun dan bertanggungjawab pa da presiden sehingga Polri tidak diintervensi.

Community Policing:

Setelah tewasnya Dr Azahari (2005) nyaris aktivitas teroris di Indonesia lumpuh tak ada kegiatan kekerasan. Ini bukan berarti teroris sudah tak ada di Indonesia. Mereka mengubah pola perjuangan dari kekerasan fisik ke kekerasan akidah. Dakwah-dakwah nya menebar pesona radikalisme Islam; jihad dijadikan tipikal tematis. Menyusup kema na-mana memanfaatkan situasi sosial yang agamis 90% lebih Muslim sangat well come pada siapapun yang mengatasnamakan Islam. Tak sadar masuk jaringan terorisme non violence, penggalangan pemahaman Islam radikal. Pola gerakannya ***cel system***, pola penggalangannya ***Layering System***. Lihat bagan pyramida terbalik dibawah ini:

Symphatisers	5 Hal Pendukung Teroris 1. Terlatih hindari Polisi
Supporters	2. Identity System kacau 3. Masyarakat Permisif
Active Member	4. Strategy Ikhwan 5. Social Bunker
Hardcore	

Dari pyramida tersebut terdapat 5 indikator kenapa tokoh teroris Nurdin M Top sulit ditangkap. (1); Terlatih menghindari kejaran polisi. (2); sistem identitas penduduk mudah, seseorang bisa memiliki beberapa KTP dengan identitas berbeda. (3); Sikap permisif (teposeliro) tak mau usik orang meski belum dikenal tinggal dilingkungannya. (4);Sel gerakannya luas dan mudah diterima masyarakat sebagai ikhwan (saudara) sesama muslim. (5); kondisi sosial jadi *social bunker* (persembunyian sosial) sulit diditeksi karena bunker manusia bukan bunker bawah tanah yang mudah dideteksi teknologi.

Polri dengan program *Community Policing* (pemolisian komunitas) mengajak ulama dan komunitas pesantren ikut menyadarkan umat dalam memahami Islam yang rah matan lil'alamin. Islam agama damai mengharamkan kekerasan. Kekerasan (Asyida'u 'alal kuffar) hanya dilakukan pada orang/kelompok yang menyerang Islam. Sedangkan negara dan pemerintah Indonesia sangat cinta Islam. Membangun Islam, tak ada alasan apapun untuk menebar teror di Indonesia.

Pemberantasan KKN, Kenapa Gagal?

Tap MPR XI/1998 tanggal 13 Nopember 1998 mengamanatkan pemberantasan KKN ruh utama reformasi. Kini reformasi sudah 10tahun. Berhasilkah? Tidak! KKN era re formasi makin terbuka, makin merajalela. Nepotisme juga menggila. Renungkan kasus Ilham Habibi untuk koreksi reformasi. Kenapa gagal? Ada beberapa indikasi bisa dikaji.

Pertama; orang Indonesia sudah tak punya rasa malu apalagi rasa bersalah. Lihat peja bat publik negara lain jika ketahuan korupsi. Langsung munndur. Jangankan korupsi yang merugikan rakyat banyak, slingkuh saja mereka langsung mundur dari jabatannya. Pejabat Indonesia ndablek, tak punya malu. Padahal agama jelas; "malu bersalah adalah syarat Iman". **Kedua**; hukum tidak tegas. Hukum mestinya berdampak jera dan malu bagi pelakunya. **Ketiga**; elite Indonesia merasa benar sendiri selalu menoleh ke bela kang tidak menatap ke depan. Karenanya rekonsiliasi sesuatu yang sulit disini? Padahal rekonsiliasi juga ajaran agama (Sejarah Merebut Mekah; apa yang dilakukan Muhammad saw?) Lihat Nelson Mandela yang dipenjara 27tahun oleh

penguasa Apartheid, De Clark. Bergitu Nelson bebas/menang dalam Pemilu apa yang dilakukan? Merangkul De Clark bersama-sama membangun Afsel. Kenapa justru Nelson yang ikuti ajaran Nabi saw? **Keempat;** Sumpah jabatan tidak direformasi (Pasal 3 Tap XI/1998) cara sumpah masih seperti era sebelum reformasi.

Setidaknya ada dua solusi; **Pertama**; Hukum harus pasti dan mampu ciptakan rasa malu, menyesal dan jera. Koruptor di Cina dihukum mati. Di AS divonis penjara ra tusan tahun bukan seumur hidup. Di Indonesia saya tawarkan adopsi syariat Islam sebagai salah satu sumber hukum. Hukum Islam pencuri dipotong tangan. Kita tak perlu persis itu. Misal selain harus mengembalikan hasil korupsi dikalikan 5 kali lipat juga lihat nilai nominalnya. Jika korupsi 1m dipotong 1 jari. 2 milyar dipotong 2jari dst. 10milyar dipotong 10 jari. Diatas 10m sampai 50m potong 1pergelangan tangan. Diatas 50 sam pai 100m potong 2pergelangan tangan. Diatas 100 sampai 300m, potong 1 siku. Diatas 300 sampai 500m potong 2 siku. Diatas 500m dihukum mati. Memang hukum juga ha rus dapat mempermalukan pelaku.

Kedua; Sumpah jabatan harus direformasi yang bisa menggetarkan hati dan ra sa takut bersalah. Inspiring lihat sumpah dalam Al Qur'an surat Nur 6/7. Sumpah selalu diakhiri kata-kata "jika saya melanggar sumpah Allah melaknat saya dunia dan akherat". Maka saya coba rumuskan sumpah untuk pejabat publik begini;

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH ....apa inti sumpah....jabatan yang diemban ....isi sumpah ..... lalu diakhiri kata-kata; JIKA SAYA MELANGGAR SUMPAH INI MAKA ALLAH AKAN MELAKNAT SAYA DI DUNIA DAN AKHIRAT.

(Ini murni ide/sumbangan pikiran saya pribadi bukan institusi)

Demikian sumbangan pemikiran saya pada simposium yang mulia ini semoga ber manfaat dan semoga Allah swt meridhoi. Amien.

*)Simposium diselenggarakan dihotel Sultan Jakarta, atas prakarsa 4 LSM dalam dan luar negeri; HRWG (Human Rights Working Group), IDSPS (Institut for Defense Security and Peace Studies), LESPERSSI (Lembaga Studi Pertahanan & Strategis Indonesia) dan Swiss DCAF (The Geneva Center for Democratic Control of Armed Force)

**) Anton tabah, Staf Ahli/ Staf Khusus Kapolri // Widyaiswara Madya Sespimpol // Kolumnis // Dosen Tamu diberbagai Perguruan dan Lembaga Pendidikan Tinggi.